

“TEKNIK PENYAJIAN PERMASALAHAN PUSAT LISTRIK TENAGA NUKLIR (P.L.T.N.) KEPADA MASYARAKAT DI INDONESIA.

Drs. E. Siswojo. *)

PENDAHULUAN.

Departemen Penerangan menyambut dengan gembira terhadap diadakannya Lokakarya Badan Tenaga Atom Nasional yang bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dalam hal ini Perusahaan Umum Listrik Negara, dengan pokok permasalahan KESELAMATAN REAKTOR dan SEGI HUMASNYA, dengan pertimbangan bahwa masalah keselamatan reaktor perlu diketahui secara sebenarnya oleh masyarakat, maupun bagi pihak Pemerintah dalam hal ini Departemen P.U.T.L. dan instansi-instansi lain yang berhubungan, atau lebih luas lagi agar tidak menimbulkan kerugian nasional, yaitu dengan kemungkinan menjadi hambatan terhadap pembangunan nasional.

Departemen Penerangan, menurut status dan fungsinya adalah sebagai aparat penerangan Pemerintah yang bertugas menyampaikan penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan Pemerintah kepada rakyat banyak.

Dewasa ini oleh Departemen Penerangan telah dirumuskan tugas pokok yang meliputi empat garis besar yaitu :

1. Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa bangsa !
2. Mensukseskan pembangunan nasional melalui REPELITA;
3. Memantapkan stabilitas nasional; dan
4. Menjalankan tugas-tugas khusus yang beruang lingkup nasional dan bersifat insidental, seperti Pemilihan Umum dan kegiatan-kegiatan nasional lainnya.

Tentu saja rumusan tugas pokok tersebut sangat luas ruang lingkupnya dan sengaja bahwa rumusan tugas pokok tersebut untuk disediakan sebagai landasan dari pada setiap kegiatan penerangan yang lebih terperinci dan lebih menjurus, termasuk kegiatan kehumasan yang merupakan bagian dari pada kegiatan penerangan.

Didalam melakukan fungsi penerangan Pemerintah, Departemen Penerangan melakukan kegiatan penerangan sendiri, ialah misalnya dengan melakukan penerangan langsung maupun penerangan yang menggunakan media komunikasi massa seperti, barang cetakan, radio, film dan televisi.

*) Direktur Penerangan Rakyat Departemen Penerangan R.I.

nuclear damage), sehingga akibatnya lebih dari biaya yang tidak dihitung.

2. Suatu tinjauan aspek ekonomis tidaklah lengkap apabila kita tidak menghitung keuntungan (benefit) dari proyek PLTN. Hal ini sesuai dengan paper Sdr. Mundo Pramono yang mana mereka harus membuat cost benefit Analysis terhadap pengaruh lingkungan baik pengaruh positif maupun negatif. Dalam tema Lokakarya ini, perlu dibuatkan pengertian yang jelas pada semua pihak, supaya tidak terpujau oleh angka-angka biaya yang besar (hampir satu milyar \$)

JAWABAN :

Jasif Ilyas :

1. Umumnya pemilik PLTN diharuskan menjamin kerugian pada pihak ketiga dengan menutup suatu asuransi untuk instalasinya. Ongkos asuransi modal dimasukkan dalam Ongkos Modal, lihat Tabel II pos e, jadi tidak merupakan pengeluaran tambahan.

Cost-benefit analysis merupakan suatu bagian dari suatu laporan pelaksanaan proyek (feasibility study) Laporan pelaksanaan ini umumnya dipergunakan untuk mendapat persetujuan Pemerintah untuk proyek tersebut, dan sekaligus untuk mencari modal dari bank-bank.

Dalam laporan pelaksanaan dijelaskan bahwa sudut ekonomis dan teknis proyek yang diperjuangkan itulah yang menguntungkan, dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain.

Disamping itu Departemen Penerangan mempunyai fungsi koordinasi terhadap kegiatan penerangan dari pada aparat Pemerintah yang lain, serta berfungsi pula melakukan pembinaan terhadap kegiatan penerangan masyarakat, baik penerangan langsung maupun penerangan yang menggunakan media masa.

PERMASALAHAN.

Penerangan dan Kegiatan Hubungan Masyarakat sebagai Aparat Komunikasi.

Penerangan adalah kegiatan berkomunikasi dari satu pihak dengan pihak lain, dengan tujuan agar tercipta suatu persesuaian pendapat serta pendirian oleh orang yang memberi dan orang yang menerima penerangan mengenai suatu masalah.

Dengan pengertian tersebut penerangan sebagai proses komunikasi dapat dilakukan oleh dua pihak yang kualitasnya tidak tertentu, artinya antara siapa dengan siapa adalah tidak penting dalam proses penerangan, dapat saja antara perorangan dengan perorangan yang lain terjadi proses penerangan antara instansi atau organisasi dengan orang lain dapat pula terjadi proses penerangan.

Biasanya proses penerangan terjadi secara timbal balik, yaitu dengan mengembangkan komunikasi dua jalur, dengan memperhatikan dialog agar dapat lebih cepat tercapai keputusan yaitu persesuaian pendirian ataupun tidak persesuaian mengenai sesuatu masalah tertentu.

Kegiatan Hubungan Masyarakat (HUMAS) sebenarnya dari segi proses dan tujuan komunikasinya adalah sama, bahwa kegiatan HUMAS juga merupakan kegiatan komunikasi dengan orang lain dengan tujuan mencapai persesuaian pendirian, kesatuan pendapat dan kesamaan tindak. Perbedaannya adalah terletak kepada unsur-unsur yang berkomunikasi serta bobot pesannya.

Yang dimaksud dengan "Unsur-unsur yang berkomunikasi" didalam kegiatan HUMAS ialah Instansi atau Badan yang ingin menyampaikan pesan di satu pihak dan masyarakat tertentu yang ingin dimintakan pendapat serta pendiriannya yang sesuai, dipihak lain.

Hal ini jelas apabila ditarik pandangan mengenai status dari pada bagian Hubungan Masyarakat dengan instansi yang memilikinya. Bagian HUMAS hanya lah bagian dari pada Instansi tertentu yang mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan tertentu tersebut hanya akan dapat dicapai dengan sempurna apabila memperoleh pengertian, dukungan ataupun partisipasi orang banyak.

Bagian HUMAS-lah yang harus bekerja untuk menggalang pengertian, dukungan ataupun partisipasi dari masyarakat tertentu melalui kegiatan komunikasi, atau dengan kata lain HUMAS-lah yang harus bertugas mengadakan pengamanan preventif dari pada suatu kegiatan sesuatu instansi yang berkaitan dan menyangkut kehidupan rakyat banyak.

Dengan sedikit keterangan diatas kita akan lebih mudah mengerti terhadap keadaan di Indonesia, di mana terhadap Departemen Penerangan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penerangan Pemerintah dan membina penerangan dikalangan masyarakat melalui proses komunikasi sosial, serta dimana terdapat Bagian-bagian Masyarakat pada Departemen-departemen yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penerangan yang ruang lingkup pesan, tujuan serta sasarannya lebih terbatas, yaitu terbatas dengan kaitan langsung terhadap fungsi-fungsi dari pada Departemen tertentu atau lembaga-lembaga tertentu itu.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai masalah.

Dimanakah letaknya P.L.T.N. didalam kompleks permasalahan masyarakat

Indonesia dewasa ini ?

Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, yang terdiri dari lapisan-lapisan serta golongan-golongan, yang berakar dari kebudayaan yang berbeda-beda, yang bertaraf pendidikan yang bermacam-macam, memiliki kompleks permasalahan yang berbeda-beda pula titik beratnya.

Sementara anggauta masyarakat yang terbanyak yaitu masyarakat pedesaan yang konon mencapai jumlah kurang lebih 82% mempunyai kompleks permasalahan yang mungkin sederhana, yaitu misalnya masalah pangan dan pendidikan, serta masalah sandang dan papan, walaupun serba kecupetan, tidak dijadikan masalah; -- dan masyarakat kota yang menghadapi hampir semua bidang permasalahan, dari soal kesempatan kerja yang berkaitan dengan soal pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan sebagainya, tidak dapat dengan mudah dirumuskan satu persatu, namun kiranya dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa baik masyarakat Indonesia yang tinggal dipedesaan maupun yang tinggal dikota mempunyai permasalahan hidup, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup, mengusahakan peningkatan kesejahteraan, menghindarkan dan jika perlu menghadapi rintangan, hambatan, tantangan dan ancaman.

Masyarakat akan senantiasa menggumuli kehidupannya sehari-hari akan menyambut baik terhadap setiap pembaharuan yang meyakinkan bahwa hal tersebut akan menambah tingkat kesejahteraannya, bahkan apabila perlu dengan pengorbanan tertentu, tetapi sebaliknya masyarakat akan menghindar, bahkan akan menentang apapun yang mengganggu milik yang dengan susah payah diperolehnya, akan menghindari bahkan menentang usaha-usaha yang dirasakan akan mengganggu dan mengancam kehidupannya.

Banyak sekali contoh-contoh bagaimana masyarakat berpartisipasi terhadap usaha-usaha pembaharuan didalam pembangunan nasional kita apabila mereka setelah dapat diyakinkan bahwa manfaat pembaharuan tersebut benar-benar akan dapat dinikmati dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan hidupnya, lahir maupun batin. Program pembinaan massal pada bidang pertanian, peternakan, program-program pendidikan, program-program kependudukan dan program-program lainnya ternyata telah mendapatkan tanggapan masyarakat secara positif, karena program-program tersebut dirasakan sebagai salah satu usaha memecahkan permasalahan hidupnya.

Bahkan proyek-proyek pembangunan seperti bendungan-bendungan besar di beberapa daerah yang disana-sini akan mengubah wajah serta peta pemukiman, pada akhirnya mendapat pengertian dari masyarakat, bahkan dari golongan yang paling berpegang kepada sifat-sifat tradisionil yang seakan-akan walaupun bagaimana tidak akan beranjak dari bumi tanah tumpah darahnya.

Bagaimana dengan proyek P.L.T.N. ?

Marilah kita berfikir sederhana, karena kita justru akan membicarakan permasalahan pada masyarakat yang sebagian besar sifatnya sederhana.

P.L.T.N. adalah Pusat Listrik Tenaga Nuklir; hal ini suatu pengertian baru bagi rata-rata anggauta masyarakat pada umumnya, yang tentu saja dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

Masyarakat umum telah mengenal istilah Listrik, yaitu daya yang dapat menimbulkan kekuatan gerak, yang dapat menimbulkan cahaya, Listrik dewasa ini telah dikenal secara intiem oleh masyarakat kota di Indonesia dan juga sudah mulai masuk ke masyarakat desa. dan juga bahkan kehadirannya sungguh-sungguh didambakan oleh masyarakat desa.

Walaupun listrik sebagai kekuatan dapat membahayakan jiwa manusia apa-

bila salah-salah menanganinya, namun hal tersebut bukan lagi merupakan suatu hal yang menakutkan dan dianggap berbahaya oleh masyarakat. Masyarakat telah memberikan tempat didalam kehidupannya. Kemudian bukan kehadiran listrik yang menjadi masalah masyarakat, tetapi ketidak hadirannya listrik yang menjadi masalah masyarakat. Dibangkitkan oleh tenaga air, tenaga Uap, tenaga minyak bakar atau tenaga apapun sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi masyarakat umum selama penggunaan tenaga tersebut tidak secara langsung mengganggu atau mengancam kehidupan mereka. Bahkan seandainya mengganggu asal masih berada didalam batas tidak mengancam kehidupan, seperti penggunaan mesin pembangkit listrik perorangan (generator) masyarakat masih dapat menerima, asal manfaat listrik untuk digunakan sebagai tenaga dapat dipetikanya.

Kemudian pengertian istilah tenaga nuklir, rata-rata masyarakat belum mengerti secara mendalam tentang arti tenaga nuklir. Biasanya tenaga nuklir yang dikenal masyarakat adalah dalam kaitan dengan pengeritan bom, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan istilah atom. Masyarakat umum mulai mengenal pertama istilah atom ialah didalam kaitannya dengan bom pemusnah yang dahsyat yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang sungguh-sungguh menaikkan bulu roma. Setelah pengenalan itu kurang adanya informasi yang lebih luas kepada masyarakat yang awam maupun yang seakan-akan tergolong kelas elite, sehingga persepsi masyarakat umum tetap mengartikan bahwa nuklir dan atom selalu dikaitkan dengan daya pemusnah. Pengertian radiasi dan sebagainya pun hanya merupakan pengetahuan sepotong-sepotong yang disimpulkan sebagai jenis bahaya yang mengancam kehidupan.

Sehingga dengan perkiraan dua elemen, yaitu istilah listrik yang sudah diketahui dan diterima sebagai unsur yang berguna bagi manusia tidak berbahaya, dan unsur tenaga nuklir yang masih dianggap mempunyai arti yang menyeramkan, maka pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir mungkin akan menimbulkan tanggapan masyarakat dengan rasa was-was serta kekhawatiran yang mendalam, yang berarti mungkin dapat menimbulkan tentangan dari masyarakat.

Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menguntungkan ini. Pusat Listrik Tenaga Nuklir harus mampu menjelaskan keadaan dirinya secara jelas sehingga sifat-sifat yang membahayakan dan sifat-sifat yang memberikan manfaat dapat dimengerti oleh masyarakat.

Siapakah yang harus melakukan pengenalan diri ini ?

Sebagai instansi-instansi, PLTN itu sendiri yang harus melakukan, yaitu dengan kegiatan HUMAS-nya, yaitu dengan ruang lingkup sasaran yang terbatas kepada masyarakat dilingkungan proyek PLTN. itu akan dibangun, dan secara lebih luas hal ini dapat ditarik ke atas yaitu dengan kegiatan HUMAS yang memang telah ada didalam lingkungan Departemen P.U.T.L. maupun lingkungan BATAN, serta dengan dukungan kegiatan penerangan umum oleh aparaturnya Departemen Penerangan dengan media yang ada.

TEKNIK PENYAJIAN :

Misalnya telah ditentukan bahwa pembangunan P.L.T.N. akan dilakukan dan HUMAS dari pada Departemen P.U.T.L. bersama-sama dengan HUMAS dari BATAN telah ditugaskan untuk menata kondisi mental masyarakat, maka yang penting untuk diperhatikan adalah keterangan dari pada pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah proyek P.L.T.N. akan dibangun didaerah X, Y, Z; apakah diperkirakan akan menimbulkan reaksi masyarakat didaerah X, Y, Z itu sendiri, ataupun dimasyarakat daerah lainnya ? yang berakibat dapat menghambat, merusak atau menghancurkan proyek tersebut ?
 - Apabila ternyata bahwa proyek tersebut diperkirakan tidak akan menimbulkan tanggapan yang berakibat negatif, maka tidak perlulah dipersiapkan ke HUMAS an yang besar untuk proyek tersebut, cukup dengan kegiatan keHUMAS-an yang dapat memelihara pengertian masyarakat dan memupuk pengertian tersebut sehingga berkembang menjadi dukungan.
 - Apabila ternyata bahwa proyek tersebut diperkirakan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan yang langsung diakibatkan oleh pengaruh teknologi tersebut, maka HUMAS mempunyai tugas berat, yaitu tugas menanamkan pengertian yang benar mengenai proyek P.L.T.N. **Pengertian yang dapat dicernakan oleh alam fikiran masyarakat** dan berisi hal-hal yang nyata, hal yang benar ini penting karena masyarakat sederhana akan merasa sakit hatinya apabila mereka ditipu, dibohongi dan diabaikannya nilai kepercayaanya.
 - Apabila ternyata bahwa tentangan masyarakat tidak langsung disebabkan oleh pengaruh teknologi didalam lingkungan kehidupannya, misalnya masalah pemukimannya yang terganggu karena terusir tempat tinggalnya, atau oleh faktor-faktor sosial lainnya, seperti pergaulan antara keluarga pedesaan dengan tenaga-tenaga yang datang dari kota : sebenarnya bukanlah langsung merupakan masalah P.L.T.N. sebagai pembaharuan teknologi, tetapi adalah masalah-masalah sosial yang harus dipecahkan menurut bidangnya sendiri walaupun dapat saja humas memegang peranan didalam pelaksanaan.
2. Apabila proyek P.L.T.N. ingin diperkenalkan lebih umum, sebagai suatu pembaharuan serta kemajuan dibidang teknologi pembangkit tenaga listrik, yang lebih memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penggunaan sumber tenaga yang lain, sehingga memerlukan pengertian dari masyarakat tertentu, yaitu misalnya dari anggota D.P.R. untuk dapat mengerti mengenai pengajuan anggaran belanja yang mungkin sangat besar; - atau dari para ilmiawan yang diperlukan untuk bersedia direkrut untuk mengelola proyek teknologi baru/khusus ini, ataupun dari masyarakat umum agar mereka tidak mejadi takut-takut terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kehebatan tenaga nuklir tersebut ?
 - Apabila demikian halnya maka ruang lingkup tugas HUMAS akan menjadi lebih umum, namun dalam pada itu justru terlihat perlunya pengkhususan sasaran khalayaknya, yaitu siapa yang hendak dituju. Dan apabila telah sampai kepada pengkhususan sasaran khalayak maka faktor pemilihan teknik dan penggunaan media menjadi sangat penting.

Penentuan Khalayak dan Pemilihan Media :

Sasaran khalayak memang sangat perlu untuk ditentukan, agar kegiatan penerangan dapat lebih efisien. Sasaran khalayak adalah sejumlah manusia yang diperkirakan mempunyai kepentingan dengan masalah yang akan dikemukakan. Tanpa menentukan dan memilih sasaran khalayak maka penerangan tidak akan memperoleh efek yang jelas dan mungkin dan mungkin kurang berguna, baik bagi yang memberi penerangan maupun yang menerima penerangan.

Misalnya sekelompok atau selapisan masyarakat masing-masing mempunyai kekhususan masalahnya sendiri-sendiri.

Didalam Lokakarya ini aspek-aspek teknologi, aspek ekonomi dan aspek lokasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir tidak dibicarakan lagi, berarti lokakarya sekarang ini telah dapat **mengandaikan**, yaitu andai kata P.L.T.N. tersebut akan dibangun di Indonesia artinya pada lokasi tertentu baik dilingkungan pedesaan maupun dikota yang tentu saja dilingkungi oleh kehidupan masyarakat tertentu.

Masyarakat desa dimana proyek P.L.T.N. tersebut akan didirikan mungkin akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat kota yang ketempatan proyek P.L.T.N. yang sama. Bagi masyarakat sekitar proyek P.L.T.N. apabila dirasakan adanya tanggapan yang mencurigakan maka perlu diadakan pendekatan-pendekatan serta penelitian mengenai sikap yang sesungguhnya dari masyarakat tersebut. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan melalui komunikasi langsung, komunikasi face to face dengan alat-alat bantu audio visual, untuk memperagakan benda-benda ataupun pengertian-pengertian yang muskil, barang-barang secara konkrit dengan sifat-sifatnya yang membahayakan kehidupan ataupun yang tidak berbahaya. Tetapi pendekatan secara langsung dengan menggunakan alat bantu audio visual perlu diperhatikan sungguh-sungguh penyelenggaraannya, yaitu diperlukan ketelitian dan ketekunan mengingat sasaran yang diberikan pengertian adalah masyarakat sederhana.

Pameran-pameran kecil secara periodik dengan mempertunjukkan segala sifat dari pada P.L.T.N. sangat dapat menanamkan pengertian masyarakat; Penerimaan kunjungan-kunjungan secara teratur dari kelompok-kelompok anaksekolah, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang bergerak dibidang mass media juga sangat akan berakibat positif disamping kegiatan keHUMASan yang bertindak secara ofensif dan periodik, perlu pula dipersiapkan pejabat HUMAS yang secara insidental selalu siap memberikan keterangan terhadap segala macam pertanyaan yang datang dari masyarakat. Hal ini penting apabila diingat bahwa didalam kemauan masyarakat untuk mengajukan permasalahan tertentu dapat dipastikan mereka menaruh minat tertentu terhadap permasalahan, misalnya tidak jarang nantinya bahwa masyarakat akan selalu menginginkan penerangan-penerangan dan bahan keterangan dari proyek yang akan dan yang sudah dibangun, serta masyarakat senantiasa akan mau tahu terhadap segi-segi yang diakibatkan oleh pembangunan P.L.T.N. yang dihubungkan dengan kepentingan kehidupan rakyat sendiri. Walaupun keinginan dikemudian hari demikian, namun pengalaman menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia dewasa ini tidak mudah memberikan reaksi secara reaksioner, apabila tidak benar-benar kepentingannya yang paling elementer tersinggung atau terancam.

Sedangkan sasaran khalayak yang lebih luas, yang secara umum ingin diajak untuk mengerti terhadap masalah P.L.T.N., dapat diadakan pendekatan penerangan dengan menggunakan media komunikasi, walaupun disamping itu perlu juga digunakan media komunikasi langsung, untuk keperluan-keperluan ter-

tentu. Dari sejumlah media komunikasi massa yang ada, yaitu : pers, radio, film dan televisi kesemuanya dapat digunakan, hanya cara-cara penggunaannya perlu difikirkan oleh petugas HUMAS dengan sebaik-baiknya. Semua media massa mempunyai sifat tidak langsung artinya tidak akan terdapat dialog langsung antara petugas HUMAS dengan masyarakat. Tetapi mass media mempunyai jangkauan sebar yang luas, seakan-akan tidak dibatasi oleh jarak yang berkilo-kilo meter jauhnya. Pers sebagai salah satu media massa mempunyai sifat-sifatnya tersendiri, yaitu sifat siaran tertulis yang mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Radio, mempunyai kemampuan terutama dari kemampuan daya jangkau yang cepat dan sangat luas yang tidak dibatasi oleh jarak tetapi tentu saja mengandung kelemahan tertentu, yaitu sifat penyampaiannya berjalan sepiantas lalu, padahal berapa kemampuan serap manusia terhadap pengetahuan baru yang disampaikan melalui suara saja dapatlah kita perkirakan sendiri, yaitu kurang meyakinkan perserapannya. Film dan Televisi, yang merupakan penyampaian audiovisuil, mungkin mempunyai daya siar yang lebih memudahkan bagi penerimaan masyarakat, mengingat dua indra yang sekaligus diaktifkan, yaitu penglihatan dan pendengaran.

Dari pelbagai kemampuan dan sifat-sifat dasar dari pada media massa tersebut para petugas Humas harus memiliki keahlian untuk mengisi dan menyusun program siaran bagi masing-masing media. Pers, Radio maupun Televisi mempunyai rubrik-rubrik tertentu yang disediakan untuk penyampaian segala bidang permasalahan. Biasanya pemegang media komunikasi massa tersebut pada batas tertentu dapat diajak bekerja sama. Mereka akan bersedia memuat masalah tertentu apabila penyajian keterangan itu merupakan artikel yang menarik yang menyenangkan untuk dibaca dan dilihat oleh masyarakat umum. Masalah P.L.T.N. pun tidak mustahil untuk memperoleh tempat didalam rubrik-rubrik pada Pers, Radio dan Televisi, yaitu apabila memang masalah P.L.T.N. ini kemudian menjadi masalah publik. Mengingat bahwa Pers, pada umumnya, walaupun mendukung segi-segi idiiil, namun kelangsungan hidupnya terikat pula dengan aturan kegiatan komersiil, selingga perlu diperhitungkan masak-masak penyebaran penerangannya yang dilewatkan pada media Pers. Agak berbeda dengan Radio (R.R.I.) dan Televisi R.I., oleh karena dua-duanya adalah aparat penerangan Pemerintah, maka pemanfaatannya tentu tidak didasarkan kepada kepentingan untuk memperoleh keuntungan materiil, tetapi untuk memberikan pelayanan penerangan, yang oleh karena bersifat langsung disajikan kepada masyarakat, maka faktor daya tarik baik dari segi pengutaraan permasalahannya, maupun segi penyajiannya harus benar-benar dipertanggung jawabkan pula.

KESIMPULAN :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai hal dan pengertian baru perlu dimasyarakatkan, lebih-lebih apabila diingat bahwa didalam istilah P.L.T.N. tersebut terkandung hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan salah tafsir dan salah pengertian masyarakat banyak yang berakibat serba merugikan sesama pihak.
2. Cara memasyarakatkan PLTN ialah melalui kegiatan penerangan yang dilakukan oleh instansi HUMAS, baik HUMAS yang beruang lingkup luas yaitu dari Departemen P.U.T.L. dan BATAN, maupun HUMAS dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yaitu yang melekat kepada proyek pembangunan P.L.T.N. dengan sasaran dan permasalahan yang terbatas pula.

3. Kegiatan penerangan yang dilakukan oleh HUMAS dalam arti yang lebih luas maupun yang lebih sempit, dapat menggunakan semua media komunikasi, yang penting adalah pemilihan jenis media secara tepat yang disesuaikan dengan sasaran khalayaknya yang harus diketahui sifat, sikap dan kehendaknya.
4. Kegiatan penerangan oleh HUMAS dalam ruang lingkup sempit proyek pembangunan P.L.T.N., seyogyanya dilakukan secara komunikasi langsung, yaitu melalui pelayanan penerangan periodik dan pelayanan penerangan yang kontinyu siap melayani pertanyaan-pertanyaan yang datang secara insidental.
5. Kegiatan penerangan oleh HUMAS dalam ruang lingkup yang lebih luas dapat menggunakan media massa dengan isi pesan-pesan yang lebih menitik beratkan kepada masalah penyampaian pengetahuan baru mengenai segala aspek dari pada P.L.T.N., yaitu aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek sosialnya.
6. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerangan HUMAS yang berkaitan dengan proyek-proyek P.L.T.N. diperlukan pemikiran yang berusaha mencapai efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Untuk ini perlu dipertinggi mutu para petugas HUMAS, yaitu dengan memberikan pendidikan teknis tentang penguasaan media komunikasi (langsung maupun massa) dan pengetahuan kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat yang akan terkena oleh proyek-proyek P.L.T.N., disamping penguasaan materi P.L.T.N. sendiri.
7. Pemanfaatan institusi yang dewasa ini ada dibidang ke HUMAS an, seperti halnya Badan Koordinasi ke HUMAS an, harus dapat membantu kelancaran kerja HUMAS - P.U.T.L. yang khusus meng HUMAS-i P.L.T.N. Pemanfaatan aparaturnya Pemerintah termasuk medianya harus diatur lebih baik terutama didalam mendukung permasalahan P.L.T.N. yang secara umum sifatnya, dan secara luas ruang lingkungannya. Dan sebagai tambahan, pengalaman ke Humasan dari instansi yang bekerja dan berhubungan dengan masyarakat di Luar Negeri harus diterima sebagai bahan bandingan yang perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa sifat dan sikap masyarakat bangsa lain didalam menanggapi masalah-masalah kemasyarakatan yang baru.

PENUTUP :

Demikianlah sekedar sumbangan fikiran yang dapat disampaikan kepada Lokakarya Keselamatan Reaktor dan segi Humasnya; khususnya pandangan pada Teknik Penyajian Permasalahan P.L.T.N. kepada masyarakat di Indonesia.

DISKUSI

PERTANYAAN :

A. Arismunandar :

1. Berdasarkan atas informasi yang diterima melalui berita-berita pers luar negeri sebagian pers Indonesia sekarang sudah bersikap anti atau menunjukkan kecenderungan anti PLTN.
Bagaimana caranya mengatasi hal ini bila Pemerintah memutuskan membangun PLTN ?
2. Apabila belum semua instansi Pemerintah sepakat tentang pembangunan PLTN, bagaimana peranan Humas masing-masing ? Dapatkah Humas Departemen A bertentangan dengan Humas Departemen B ?

JAWABAN :

Drs. E. Siswojo :

1. Dapat dilakukan pendekatan melalui "Chief editor meeting" sehingga dapat diberikan penjelasan yang tuntas. Dari pihak PLTN dapat memberikan keterangan se jelas-jelasnya, sebaiknya menerima langsung alasan-alasan jika ada keberatan dari pers tertentu.
 - Mohon mendapat perhatian bahwa tidak semua tulisan didalam SK sepenuhnya merupakan pendapat SK yang bersangkutan, sebab banyak SK yang memberikan ruangan untuk diisi oleh penulis-penulis (ilmiah) sebagai pengutaraan pendapat masyarakat.
2. Apabila pembangunan PLTN telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah misalnya dengan Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri yang konsideransinya pasti menggantung kepada referensi keputusan Pemerintah sebenarnya tidak mungkin ada instansi Pemerintah yang tidak sepakat. Jika ada hal-hal yang seakan-akan belum serasi mungkin mengenai hal-hal yang tidak prinsipil hal ini dapat dicari pemecahannya melalui pendekatan yang dapat dilakukan antar petugas HUMAS Departemen didalam form Badan Koordinasi Kehumasan (BAKO HUMAS) yang bermarkas di Direktorat Pembinaan Humas di DEPPEN, dimana dapat dilakukan pendekatan-pendekatan sehingga tidak mungkin terjadi sehingga bertentangan antara Humas Pemerintah di forum Umum.

PERTANYAAN :

A. Arismunandar :

1. Berdasarkan atas informasi yang diterima melalui berita-berita pers luar negeri, sebagian pers Indonesia sekarang sudah bersikap anti atau menunjukkan kecenderungan anti PLTN.
Bagaimana caranya mengatasi hal ini bila Pemerintah memutuskan membangun PLTN?
2. Apabila belum semua instansi Pemerintah sepakat tentang pembangunan PLTN, bagaimana peranan HUMAS masing-masing?
Dapatkah Humas Departemen A bertentangan dengan Humas Departemen B

JAWABAN :

Drs. E. Siswoyo :

1. Dapat dilakukan pendekatan melalui "Chief editor meeting" sehingga dapat diberikan penjelasan yang tuntas. Dari pihak PLTN dapat memberikan keterangan se-jelas2nya, sebaiknya dapat menerima langsung alasan-alasan jika ada keberatan dari pers tertentu.
Mohon mendapat perhatian bahwa tidak semua tulisan didalam SK sepenuhnya merupakan pendapat SK yang bersangkutan, sebab banyak SK yang memberikan ruangan untuk diisi oleh penulis2 (ilmiah) sebagai pengutaraan pendapat masyarakat.
2. Apabila pembangunan PLTN telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah misalnya dengan Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri yang konsideransnya pasti menggantung kepada referensi keputusan Pemerintah sebenarnya tidak mungkin ada instansi Pemerintah yang tidak sepakat. Jika ada hal2 yang se-akan2 belum serasi mungkin mengenai hal2 yang tidak prinsipil hal ini dapat dicari pemecahannya melalui pendekatan yang dapat dilakukan antar petugas HUMAS Departemen didalam forum Badan Koordinasi Kehumasan (BAKO HUMAS) yang bermarkas di Direktorat Pembinaan Humas di DEPPEN, dimana dapat dilakukan pendekatan2 sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara Humas Pemerintah di forum Umum.

CATATAN TAMBAHAN :

NASKAH PRASARAN "TEKNIK PENYAJIAN PERMASALAHAN PLTN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA"

Oleh : Drs. Siswojo *)

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAMANAN PLTN.

Peranan hubungan masyarakat (HUMAS) pada suatu instansi pada umumnya, antara lain adalah untuk menciptakan kondisi mental masyarakat agar dapat menjamin keselamatan dan keberhasilan kebijaksanaan dan tindakan dari pada instansi yang memiliki HUMAS tersebut.

Secara agak berlebihan dapat digambarkan bahwa HUMAS harus berkomunikasi dengan masyarakat melalui cara-cara apapun dengan tujuan untuk membentuk kondisi mental masyarakat dan mengarahkan tindakan masyarakat agar dapat menguntungkan dan meningkatkan keuntungan instansi yang memiliki HUMAS tsb.

Contoh yang konkrit, misalnya siaran HUMAS dari sebuah pabrik bier, yang dapat berusaha membentuk pola berfikir masyarakat dengan menyebutkan bahwa manusia yang mempunyai kebiasaan minum bier adalah manusia modern, kemudian menganjurkan masyarakat agar minum produksi dari pabriknya senantiasa supaya masyarakat dapat disebut sebagai manusia modern. Dari siaran ini tujuannya terpusat kepada usaha untuk mencapai keuntungan perusahaan tersebut sebesar-besarnya, dengan demikian tanpa memperhatikan kepentingan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kita dapat membayangkan betapa parahnya masyarakat apabila kemudian minum bier menjadi membudaya, menjadi status symbol, dan menimbulkan anggapan yang salah menganalogikan tingkat modern dengan ukuran minum bier.

Tetapi sebenarnya HUMAS haruslah mempunyai tanggung jawab secara lebih luas, yaitu termasuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. HUMAS yang bertanggung jawab kepada masyarakat seperti halnya keharusan mutlak bagi HUMAS dari instansi Pemerintah, harus senantiasa bergerak dan berusaha untuk dapat menciptakan kondisi mental masyarakat serta membentuk pengertian-pengertian dan mengarahkan langkah-langkah masyarakat kearah pencapaian hasil yang menguntungkan instansi Pemerintah yang memiliki HUMAS tersebut, tetapi sekaligus juga harus menguntungkan masyarakat, karena sebenarnya tugas-tugas yang dikerjakan oleh instansi tersebut tidak lain adalah juga merupakan tugas yang dasar filosofinya adalah usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi apabila proyek PLTN merasakan perlu adanya usaha pengamanan dari pada usahanya yang dikaitkan dengan usaha untuk menguntungkan kepentingan semua pihak maka perlu adanya HUMAS pada proyek PLTN ini, atau setidaknya perlu adanya kegiatan HUMAS yang mendukung proyek PLTN ini.

*) Departemen Penerangan

Katakanlah bahwa PLTN telah menjadi keputusan nasional, yaitu sebagai salah satu usaha bangsa Indonesia untuk memecahkan masalah energi dimasa yang akan datang, maka yang menjadi soal ialah bagaimana menyelamatkan proyek tersebut dari segi pengaruh terhadap masyarakat dan dari segi tanggapan dari masyarakat sendiri.

Apakah sebenarnya yang ingin diselamatkan dimana penyelamatannya ditugaskan kepada HUMAS ?

- Pabriknyakah ? - termasuk dengan segala sesuatu faktor yang menjamin kelangsungan hidup pabrik tersebut ?
- Orang-orang yang bertugaskah ? - yang setiap saat menghadapi kemungkinan terkena radiasi ?
- Atau orang-orang disekitar proyek PLTN kah ? - yang lingkungan hidupnya mungkin akan terkena segala macam polusi atau pencemaran yang dapat mengancam keselamatan hidupnya, lambat atau cepat ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diketahui untuk dapat memberikan batasan dari pada tugas HUMAS, serta pula untuk menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan yang nyata dari pada kegiatan HUMAS.

Untuk mengamankan proyek, mengamankan pabrik, mengamankan segala peralatan yang berbahaya dan untuk mengamankan manusia-manusia baik para pekerja maupun anggota masyarakat lingkungan, sebenarnya secara teknis telah diatur dengan cermat bahkan telah tertuang didalam ketentuan yang berkekuatan hukum ialah dengan perundang-undangan serta peraturan yang telah ada dan yang setiap saat dapat ditambah dan disempurnakan apabila dirasakan masih perlu untuk menampung masalah-masalah baru.

Tetapi yang menjadi soal adalah mengetrapkan undang-undang dan peraturan-peraturan pengamanan tersebutlah yang perlu untuk mendapatkan perhatian, sebab kecelakaan-kecelakaan, bencana-bencana yang meminta korban jiwa dan harta benda sebagian besar disebabkan oleh tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang secara preventif telah sengaja dipersiapkan untuk pengamanan.

Walaupun undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut bersifat sebagai hukum yang mengikat, namun kenyataannya; apakah sempat para pekerja itu mendalami isi dan makna undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut terhadap para petugasnya ? Apakah rakyat disekitar proyek pembangunan PLTN sempat dan mampu berfikir secara mendalam, rasionil dan obyektif menghadapi proyek PLTN diwilayahnya ?

Rasanya hampir seluruh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut berbunyi tidak. Banyak kenyataan yang dapat kita kemukakan, antara lain walaupun setiap perundangan dan peraturan dianggap berlaku dan dianggap diketahui oleh seluruh masyarakat kenyataannya sering terjadi bahwa sangat sedikit orang yang bisa memperoleh naskah undang-undang dan peraturan tersebut, sehingga bagaimana mungkin orang dapat mempelajari dan mengartikannya, sehingga menjadi dianggap lumrah apabila terdapat pabrik-fabrik yang vital tidak mendapatkan perhatian mengenai pemagarannya, terdapat pabrik bahan peledak yang sangat berbahaya dikitari perumahan pegawai, terdapat pabrik-pabrik yang mudah terbakar tidak sempurna penyediaan alat-alat pemadam kebakarannya, pakaian-pakaian kerja khusus seperti sepatu, sarung tangan, kaca mata dan topi baja tidak selalu disediakan atau tidak selalu digunakan oleh para pekerja pada

proyek-proyek yang menurut ketentuan harus menggunakannya.

Banyak industri kecil dan yang tidak kecil, yang membuang ampas bahan industrinya secara sembarangan tanpa mendapatkan perhatian dari pemilik pabrik, masyarakat sekeliling dan bahkan instansi penguasa setempat, sebelum akhirnya terjadi korban-korban yang menderita dan apabila ternyata kemudian jatuh korban maka masyarakat menanggapi serta mengambil tindakan-tindakan yang seringkali lepas dari proporsi yang wajar karena mungkin didorong oleh emosi yang muncul tiba-tiba atau sengaja dimunculkan dan diledakkan oleh pihak-pihak tertentu.

Lalu, siapakah yang harus menjembatani jurang pengertian ini ? Yang menghubungkan pengertian didalam undang-undang dan peraturan kepada orang-orang baik pekerja maupun masyarakat ? Disinilah letaknya, antara lain tugas penting dan peranan HUMAS. Memasyarakatkan peraturan-peraturan tentang penyelamatan dan pengamanan PLTN kepada masyarakat banyak agar mengerti dan dipatuhi adalah salah satu tugas HUMAS., disamping tugas memperkenalkan pengetahuan tentang PLTN yang rumit itu kepada masyarakat secara sederhana, secara populer dan terarah.

Bagi HUMAS yang baik cara membuat orang lain mengerti dan membuat orang lain mengerti dan membuat masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut haruslah dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, dengan cara memberikan penerangan yang diwarnai oleh motivasi-motivasi yang mudah diterima akal sehat, dengan memberikan penjelasan-penjelasan teknis yang disajikan secara populer sesuai dengan tingkat kemampuan berfikir masyarakat yang dihadapinya.

Didalam institusi HUMAS biasanya ditentukan bahwa mereka itu akan berhubungan dengan umum, atau masyarakat (public). Publik yang bersifat umum ini dibagi agar dapat lebih jelas untuk penentuan isi pesan dan pengarahannya tujuan, yaitu :

- a. internal public (sasaran di dalam), dan
- b. external public (sasaran diluar).

Internal public ialah kelompok manusia yang terlibat secara langsung didalam kegiatan PLTN, yakni pegawai, petugas teknis maupun administratif (hal ini bagi HUMAS PLTN). Kepada mereka perlu diberikan pengertian yang sungguh-sungguh mengenai segala segi dari pada PLTN itu, baik filosofi yang mendasari adanya PLTN, maupun teknologi serta teknik yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan, baik yang menyangkut kemanfaatan maupun yang menyangkut bahaya-bahayanya. Banyak jenis benda-benda peralatan-peralatan yang harus diolah secara hati-hati, sebab apabila terjadi keteledoran mungkin akan menimbulkan bencana, tidak hanya terhadap petugas yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat luas, atau bahkan dapat meningkat sebagai bencana nasional.

Kiranya perlu diingat bahwa bukan semua petugas didalam PLTN adalah ahli-ahli nuklir, atau ahli listrik yang menggunakan tenaga nuklir, karena tentu diantara para teknisi juga terdapat juru tulis, petugas tenaga kasar, pelayan-pelayan kebersihan, petugas keamanan umum yang setiap hari harus juga "bergaul" dengan peralatan-peralatan yang dapat berbahaya tersebut, sehingga dengan demikian kepada mereka perlu senantiasa diberikan pengertian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan serta petunjuk. Disiplin untuk pemberian petunjuk secara teratur, jelas terarah dan lengkap dan untuk mematuhi petunjuk secara tertib haruslah dipelihara oleh HUMAS. Hal ini perlu saya kemukakan ka-

rena internal relations yang mengatur pemeliharaan disiplin serta menanamkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan rata-rata belum dikerjakan dengan baik di dalam ke HUMAS-an, pada hal patuh dan berdisiplin rata-rata belum membudaya didalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, sehingga tidak mustahil apabila sifat tersebut terbawa didalam kehidupan lingkungan kerja yang benar-benar menuntut adanya disiplin mengingat segi pengamanan dari pada proyek seperti proyek PLTN itu.

External Public, sebenarnya ialah masyarakat luas itu. Namun didalam kehumasan biasanya diambil bagian tertentu dari pada masyarakat luas itu, ialah masyarakat yang diperkaitkan mempunyai kaitan dan dianggap berkepentingan. Kelompok-kelompok tersebut disebut sebagai special public. Menentukan special public secara jelas ini penting, agar penerangan dan keterangan-keterangan dari HUMAS benar-benar memperoleh tanggapan yang berguna dari sasaran yang memang berkepentingan. Kelompok khusus ini adalah kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh dari proyek PLTN, tetapi juga yang dapat secara langsung berpengaruh terhadap proyek PLTN itu. Antara terpengaruh dan dapat berpengaruh yang timbal balik ini kadarnya harus diusahakan agar senantiasa bernilai positif, dengan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh HUMAS. Dengan demikian dituntut kemahiran dari pada petugas HUMAS didalam melakukan profesinya, untuk itu diperlukan pengetahuan dasar ke HUMAS-an yang meliputi pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan untuk menggunakan media penerangan, baik yang bersifat langsung secara tradisional, maupun yang menggunakan media komunikasi massa yang kadang-kadang mempunyai kompleksitasnya sendiri-sendiri. Disamping itu HUMAS memerlukan status yang tegas yaitu status yang melekat kepada pimpinan management dari pada unit yang memiliki, yaitu agar sumber-sumber kebijaksanaan yang harus dimasyarakatkan dapat diperoleh secara langsung dan lengkap termasuk latar belakangnya, dan sekaligus HUMAS harus berkedudukan pada tempat yang mudah dihubungi oleh masyarakat baik fisik maupun spirituilnya. yang artinya dapat menjadi penampang aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk kebijaksanaan pimpinan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi misalnya kehadiran HUMAS pada proyek PLTN hanya sekedar pelengkap formil, sebagai embel-embel yang membuat instansi ini seakan-akan menjadi lengkap, walaupun kenyataannya tidak melaksanakan fungsinya ataupun melakukan sesuatu tapi secara tidak semestinya.

Barangkali suatu kasus pada beberapa tahun yang lalu ada gunanya kita ingat, yaitu pernah terjadi disalah satu pekan raya "peringatan 200 tahun kota Yogyakarta" jika tidak keliru. Pada waktu itu terjadi kepanikan masyarakat karena dikabarkan bahwa stan pameran entah instansi apa namanya, menyatakan bahwa sebuah benda kecil hilang, ternyata benda kecil tersebut adalah sebuah "reaktor atom". Hal tersebut membuat panik masyarakat, betapa takutnya masyarakat terhadap kemungkinan terkena radiasi. Bayangan adanya bahaya walaupun tidak jelas apa bentuknya dirasakan oleh masyarakat dan menyebar dari mulut ke mulut. Untunglah beberapa hari kemudian benda tersebut dinyatakan telah dikembalikan oleh seseorang pelajar yang semula secara iseng mengambil benda tersebut dari pameran.

Saya berpendapat bahwa hal ini adalah sebagian besar kekeliruan instansi dan HUMAS yang melakukan pameran tersebut. Yaitu kekeliruan didalam melaksanakan tehnik pameran, ialah dengan memamerkan barang asli yang kebetulan mengandung bahaya, serta menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau

pengunjung dan tanpa penjagaan yang baik, atau bahkan sebenarnya tidak diketahui secara sungguh-sungguh oleh penjaga pameran akan barang-barang yang dipamerkan. Hal ini sering terjadi bahwa didalam banyak pameran umumnya penjaga-penjaganya adalah sekedar dipajangkan wanita-wanita cantik yang tidak dipersiapkan matang-matang sebagai juru penerang dari pada benda-benda yang dipamerkan. Lagi pula pameran adalah jenis penerangan dengan memberikan fisualisasi dan fisualisasi ini tidak selalu perlu menunjukkan barang-barang asli tetapi dapat digantikan dengan benda-benda tiruan yang bentuknya asli tetapi tidak berfungsi sebagai barang itu sendiri, tidak efektif, seperti misalnya memamerkan "granat tangan" di dalam pameran produksi senjata dalam negeri, tentu saja tidak perlu di pajang granat yang lengkap dengan detonator dan mesiuanya bukan ?

Contoh lain, seringkali di dalam pameran yang serupa, disebarkan "leaflet" kepada pengunjung secara sembarang dengan antara lain disebabkan oleh para penjaga pameran yang segan atau memang tidak siap untuk memberikan keterangan lisan. Ternyata apabila diteliti sebagian besar leaflet yang biaya produksinya mahal tersebut tidak mencapai sasaran, artinya tidak dibaca karena orang-orang atau anak-anak yang menerima leaflet secara sembarang tersebut memang tidak siap mental untuk membaca, karena perhatiannya memang tidak kesana walaupun leaflet tersebut telah dipersiapkan dengan ujud indah dan menarik.

Tulisan-tulisan didalam surat kabar yang disajikan secara kurang populer dan kurang disertai gambar-gambar yang menyederhanakan permasalahan ilmu pengetahuan yang rumit-rumit biasanya hanya menarik bagi pembaca yang mempunyai minat khusus, yang sebenarnya biasanya memang telah memiliki persepsi keahlian dibidang tersebut dan kehidupannya pun terlibat oleh ilmu pengetahuan tersebut, tetapi bagi pembaca yang berkeahlian lain bidang, tidak "sempat" atau kurang menyempatkan diri membawa artikel berat yang diluar kerangka kepentingannya, dan bagi pembaca awam dapat dipastikan bahwa persentase yang besar hanyalah ingin membaca artikel-artikel ringan untuk sekedar mengisi waktu luang ataupun artikel-artikel dan berita-berita yang langsung melibat kepentingan kehidupannya, entah dari segi politik, ekonomi, kebudayaan maupun keamanan ketertiban.

Didalam siaran radio dan televisi sering sekali kita mendengar siaran ke-Humasan yang terasa kering dan disajikan pada waktu-waktu yang kurang menguntungkan, artinya pada saat-saat rata-rata pendengar/nonton memerlukan waktu untuk keperluan lain entah untuk belajar ataupun untuk makan malam, atau sedang didalam mencari hiburan.

Maka tidak jarang siaran tersebut tidak mencapai sasaran yaitu ataukah tidak dapat diserap secara sempurna, atau bahkan siaran tersebut tidak mau diterimanya karena dengan sengaja dimatikan oleh yang bersangkutan. Pada hal kita tahu harga siaran, terutama siaran televisi yang amat mahal itu, belum lagi persiapan naskah dan sebagainya, belum lagi apabila kemudian terjadi salah duga, yaitu pihak instansi tersebut merasa telah menyampaikan penerangan dengan anggapan dengan sendirinya masyarakat telah mengetahui kebijaksanaan instansi tersebut ternyata pada saat langkah lanjutan yang konkrit daripada kebijaksanaan tersebut hendak dilaksanakan masyarakat memberikan reaksi yang tidak diharapkan.

Demikianlah beberapa bunga rampai kasus kegiatan ke Humasan yang seringkali kurang mendapatkan perhatian oleh petugas-petugas Humas sendiri dan

juga tidak oleh instansi-instansi yang memiliki institusi Humas tersebut. Padahal sesungguhnya Humas dapat mengambil peranan yang penting sekali untuk mengamankan pelaksanaan suatu management terutama apabila dikaitkan dengan tanggapan, dukungan dan partisipasi masyarakat.

Untuk dapat memenuhi fungsi yang penting tersebut memang Humas dan kegiatan ke Humasan memerlukan tempat serta jawab yang tepat dan tentu saja memerlukan pelaksana yang tepat pula, yang ahli, baik dalam bidang kemasyarakatan maupun bidang teknis, serta yang mampu menjembatani pengertian antara instansi yang diwakili dengan pengertian masyarakat secara timbal balik yang mampu bekerja secara "Mission Oriented" dengan sistim "Audience approach" yang tepat.

Demikian tambahan catatan daripada prasarana yang telah disampaikan terdahulu untuk sekedar penggaris bawahan persoalan yaitu penempatan Humas sebagai salah satu unsur pengamanan didalam pembangunan PLTN yang akan datang.